

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga Maret 2009.
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua Maret 2012.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid 2, Cetakan Pertama, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2004.
- , *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Cetakan pertama Juli 2002.
- , *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, *Serba Serbi Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Cetakan kelima, Bandung, Mandar Maju, 1991.
- Bakhrul Amal, *Pengantar Hukum Tanah Nasional, Sejarah, Politik, Dan Perkembangannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- , *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, cetakan ke delapan (edisi revisi), 1999.
- , *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Djambatan, Edisi Revisi Cetakan Kesepuluh, 2005.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan kelima edisi revisi, 2006.
- Dadang Suhendi Wirapradja, *Penyelesaian Hukum Kasus-Kasus Pertanahan*, PT. Arutmin Indonesia, 2003.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Cetakan kedua Februari 2013, Bandung.
- Dyara Radhite Oryza Fea, *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah & Perizinannya*, Buku Pintar, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 2016.
- Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris di Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Cetakan kedua Agustus 2017.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*, Ind.Hill-Co, Jakarta Selatan, Cetakan kedua, Desember 2004.
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda*, , Mandar Maju, Cetakan I 2014.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan III, 2001.
- , *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

- , *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- , *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Herman Sihombing, "*MENTAWAI*", Bahagian Penerbitan dan Bursa Buku Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, Padang, 1960 (terbit kembali Februari 1974).
- H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2017.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria, Perspektif Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, April 2009.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Cetakan pertama, 2013.
- Jayadi Setiabudi, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah dan Rumah Beserta Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2015.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya Seri Hukum Harta Kekayaan*, Kencana, Juli 2003, Bogor.
- Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1954*, Bandung, Alumni, cetakan ketiga, 2003.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009.
- Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pemebebasan dan Pencabutan Hak*, Permata Aksara, Jakarta, 2015
- Muhammad Syukri Albani Nasution dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2015
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008.
- Noer Fauzi Rahman dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat*, INSISTPress, Yogyakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- R.Djatmiko, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama Maret 1995, hlm.7.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2002.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang-Jatim, 2016..
- Saleh Adiwinata, *Bunga Rampai Hukum Perdata Dan Tanah I*, Remadja Karya CV., Bandung, 1984.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Jakarta, Raja Grafindo, 2016.

- , *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, Februari 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979.
- Sedarmayanti, *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Soedjarwo Soeromihardjo, *Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria, Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.
- Stefano Coronese, *Kebudayaan Suku Mentawai*, PT.Grafindian Jaya, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan XXI, Jakarta, 1987.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Intermasa, 1994.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, edisi revisi 2007.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, PT. Alumni, Cetakan kedua, Bandung, 2004.
- Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, April 2015.
- *Pejabat Pembuat Akta Tanah-Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Kencana, Surabaya, 2016.
- Viswandro, *Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata*, PT. Buku Seru, Jakarta, 2015.
- Wira Franciska, *Kepastian Hukum Pemegang HGB di Atas HPL Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan*, Alfabeta, Desember 2016, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2016 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN);
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 407/Kpts-II/1993 tanggal 10 Agustus 1993 sebagai Dasar Penunjukan Taman Nasional Siberut (TNS);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA);
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan UMA sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat;
Surat Edaran Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/88/BPN-2007 tanggal 8 Februari 2007 perihal Alas Hak Untuk Keperluan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

C. JURNAL dan TABLOID

Firman Hasan, *Jurnal Hukum Yustisia Nomor 1*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1993.
Hermayulis, *Hak Menguasai Negara dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Indonesia*, Jurnal Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Andalas, No.11 Thn.IX/2002.
M.Koesnoe, *Menamakan hukum itu sebagai "hukum hibrida, hukum yang tempel sana tempel sini. Adat tidak, Barat pun bukan*, Majalah Varia Pengadilan, Jakarta, Oktober 1993.
Pandu Eka Pramuditya, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Negara Di Surakarta*, Jurnal Repertorium FH Universitas Sebelas Maret, Juli-Desember 2016.
Seksi Intelijen, *Situasi dan Kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai Dari Segi IPOLEKSOSBUDHANKAM*, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, 2016.
Sutrisna, *Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan*, Jurnal Repertorium FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Juli-Desember 2016.

Rus Akbar, *Save Hutan Siberut, Mandat Untuk Rieke*, Yayasan Citra Mandiri Kepulauan Mentawai, Pualiggoubat Tabloid Alternatif Dwi Mingguan No.373 Tahun XIV tanggal 1-14 Desember 2017.

Rizkiya Anggitiawan, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah Yang Masih Berupa Letter C di Kabupaten Magetan*, Jurnal Repertorium Edisi Khusus Program MKN FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

D. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Hukum

Kamus Inggris-Indonesia

E. WEBSITE INTERNET (JPEG/PDF)

Bpn.go.id

Wikipedia Indonesia *online*,

www.hukum-hukum.com, "*Alas Hak*" versus "*Hak Atas Tanah*"

<https://www.hukum-hukum.com>, *Legal Consultant*, *Alas Hak artinya Dasar Keberadaan*

www.pendidikanmuda.com, *Pengertian Surat*

Mangihot.blogspot.co.id/2017/02/pengertianjualbelitanah.html.

repository.usu.ac.id, *USU Institutional Repository-Cover.pdf*.

Fiaji.blogspot.co.id, *Hukum dan Pertanahan: Surat di Bawah Tangan sebagai Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*

Mozilla firefox.html. Muchtar Wahid, *Analisis Deskriptif Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Disertasi Universitas Hasanuddin, 2005

Repository.usu.ac.id, *Peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat*

Irmadevita.com, *Untuk pensertifikatan tanah sudah tidak perlu lagi skt*

<http://tamannasionalsiberut.org>

<https://artikel.co.id>, *Pejabat pembuat akta tanah*

<https://Idtesis.com>/metodepenelitianempiris-dan-normatif

<http://www.legalakses.com>, *Pembuatan Akta jual beli AJB tanah*

<http://irmadevita.com/2009/pensertifikatan-tanah-secara-sporadik>

<http://m.bontang.prokal.co/news/Dihapuskan,PTSLGantikanProna>

<http://www.hukumonline.com/apakah-proses-pengurusan-sertifikat-tanah-prona-dikenakan-biaya>.

<https://www.scribd.com/document/PetunjukTeknisPendaftaranBidangFisik>.

<http://property.liputan6.com/read/ptsl-cara-bpn-percepat-sertifikat>.

<http://aerogeosurvey.com/menju-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-bersama-stpn>

<https://www.cermati.com>, *Artikel Syarat serta prosedur jual beli tanah dan bangunan*.